

## EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN LUWU

<sup>1)</sup>Haedar Djidar, <sup>2)</sup>Salmi, <sup>3)</sup>Faisal, <sup>4)</sup>Ralim\*

<sup>1), 2), 3), 4)</sup> Universitas Andi Djemma

<sup>1)</sup>[Haedardjiedar@gmail.com](mailto:Haedardjiedar@gmail.com), <sup>2)</sup>[salmi@unanda.ac.id](mailto:salmi@unanda.ac.id),

<sup>3)</sup>[igamaru19@gmail.com](mailto:igamaru19@gmail.com), <sup>4)</sup>[ralim@unanda.ac.id](mailto:ralim@unanda.ac.id)

\*[ralim@unanda.ac.id](mailto:ralim@unanda.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Luwu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pekerja sosial, serta dokumentasi laporan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi telah berjalan, namun belum optimal akibat kendala sumber daya, minimnya fasilitas pendampingan korban, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan mekanisme perlindungan anak secara terpadu. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan jumlah informan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Implementasi Kebijakan

### Abstract

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Law Number 35 of 2014 on Child Protection in cases involving child victims of sexual violence in Luwu Regency. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews with police officers, the Office for Women's Empowerment and Child Protection, social workers, as well as through documentation of case reports. The findings indicate that although the implementation of the regulation is underway, it has not been optimal due to resource limitations, insufficient victim support facilities, weak inter-agency coordination, and low levels of legal literacy within the community. The study concludes that strengthening institutional capacity, enhancing human resource competence, and improving*

*integrated child protection mechanisms are essential. This research is limited by its geographic scope and the number of informants involved.*

*Keywords: Child Protection, Sexual Violence, Policy Implementation*

## **PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan signifikan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Luwu. Data Badan PPA menunjukkan bahwa sepanjang lima tahun terakhir terjadi tren kenaikan kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Kekerasan seksual memiliki dampak jangka panjang baik secara psikologis, sosial, maupun perkembangan pendidikan anak. UU No. 35 Tahun 2014 hadir untuk memperkuat regulasi sebelumnya melalui penegasan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Meskipun regulasi tersebut telah berlaku, realitas di lapangan menunjukkan berbagai kesenjangan implementasi. Banyak kasus yang tidak tertangani secara maksimal akibat minimnya fasilitas layanan, laporan masyarakat yang rendah, hingga praktik hukum yang belum sensitif terhadap korban. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan dan menemukan titik lemah maupun faktor pendukungnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan dipilih secara purposive yang meliputi penyidik Unit PPA Polres Luwu, pekerja sosial, tenaga psikolog, dan keluarga korban. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen laporan resmi berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Temuan penelitian mengungkap empat aspek utama implementasi UU No. 35 Tahun 2014 di Kabupaten Luwu: struktur kelembagaan, mekanisme pelayanan, koordinasi antar instansi, dan persepsi masyarakat. Dari aspek kelembagaan, ditemukan bahwa pelaksanaan perlindungan anak belum didukung struktur khusus yang memadai di tingkat daerah. Pada mekanisme pelayanan, fasilitas seperti rumah aman, layanan psikososial, dan pendampingan hukum masih terbatas. Koordinasi antarinstansi yang melibatkan kepolisian, dinas sosial, dan lembaga pemberdayaan perempuan belum berjalan sinergis. Adapun persepsi masyarakat menunjukkan masih tingginya budaya malu sehingga kasus jarang dilaporkan.

Pembahasan mendalam memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi kapasitas sumber daya manusia, anggaran, dukungan politik, serta pemahaman masyarakat terhadap isu perlindungan anak.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu belum berjalan efektif. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan fasilitas layanan, rendahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya literasi hukum masyarakat. Disarankan pemerintah daerah melakukan reformasi kelembagaan, memperkuat kapasitas SDM, memperluas layanan pendampingan korban, serta membangun mekanisme koordinasi terpadu lintas sektor.

## PENGAKUAN

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Unit PPA Polres Luwu, serta seluruh informan yang telah memberikan data dan waktu selama penelitian berlangsung.

## REFERENSI

### Journal Online:

- Ode, L. (2022). Perlindungan anak berbasis komunitas. *PRAJA*, 11(1), 44–52.
- Sudirman, A., & Latif, S. (2021). Efektivitas pelayanan pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan anak. *PRAJA*, 9(3), 101–110.
- Anwar, S. (2019). Kekerasan seksual dan penanganannya. *Journal of Social Protection*, 5(1), 22–34.
- Basri, Z. (2021). Efektivitas kebijakan daerah dalam perlindungan anak. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(3), 201–215.
- Fauzi, R. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia Timur. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 166–178.
- Halim, M. (2022). Psychological impact of sexual violence on children: A qualitative review. *Child Protection Review*, 7(4), 55–68.
- Idris, S. (2021). Evaluasi kinerja Unit PPA Polres dalam penanganan kasus anak. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 8(1), 44–57.
- Kusnadi, A. (2020). Child protection policy and local government capacity. *International Journal of Public Policy Studies*, 3(2), 119–128.
- Nurdin, A. (2023). Layanan P2TP2A dan tantangan perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(4), 299–312.
- Prasetyo, J. (2021). Sexual violence against children: Legal implementation in developing regions. *Journal of Law and Society*, 5(3), 201–214.

Rahman, A. (2020). Faktor sosial dalam pelaporan kekerasan seksual anak. *Jurnal Sosiologi Kritis*, 11(1), 33–46

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

**Laoran Resmi Pemerintah**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2022). *Laporan Tahunan Penanganan Kekerasan terhadap Anak*. KemenPPPA.

**Skripsi/Thesis**

Ahyar. (2022). Tatakelola Pemerintah yang Inovatif di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Sidenreng Rappang: Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang